



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA BANJARMASIN**

**LAPORAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022**

**JL. Pangeran Hidayatullah Kelurahan Benua Anyar Kecamatan
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan Telpon:(0511)
3201367,Faksimili:(0511)3201367,Email:bnnkota_banjarmasin@bnn.go.id**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan berkat dan karunia-Nya Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Laporan kinerja merupakan bagian dari upaya BNN dalam rangka penguatan kinerja dan pemenuhan kewajiban lembaga/badan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Di samping itu laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban BNN Kota Banjarmasin atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam membantu Presiden Republik Indonesia, menyelenggarakan pemerintahan melalui pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Laporan Kinerja BNN Kota Banjarmasin Tahun 2022 merupakan bagian laporan kinerja BNN Tahun Kedua dalam periode RPJMN tahun 2020-2024. Laporan kinerja ini menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis BNN sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Tahun Anggaran 2022.

Secara umum BNN Kota Banjarmasin dapat menjadi motor dalam menahan laju prevalensi 0,05% per tahun sesuai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024.

Diharapkan laporan ini dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan BNN Kota Banjarmasin dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.

Pada akhirnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja BNN Kota Banjarmasin Tahun 2022, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan perlindungan kepada kita dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Banjarmasin, Januari 2023
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Banjarmasin



Sisman Adi Pranoto, SIK, SH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan target dan sasaran kinerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Adapun realisasi target kinerja BNN Kota Banjarmasin Tahun 2022 yang menetapkan Sasaran Kegiatan yaitu :

- I. Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- II. Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- III. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN.
- IV. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika.
- V. Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi.
- VI. Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya.
- VII. Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien.
- VIII. Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur.

Melalui 9 (sembilan) Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dengan target 51,00 dan capaian kinerja 52,13
2. Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dengan target 78,68 dan capaian kinerja 99,86
3. Indeks Kemandirian Partisipasi dengan target 3,30 dan capaian kinerja 3,55.

4. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM dengan target 1 unit dan capaian kinerja 1 unit.
5. Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Banjarmasin dengan target 3,2 dan capaian kinerja 3,2
6. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional dengan target 3 lembaga dan capaian kinerja 3 lembaga.
7. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 dengan target 1 berkas dan capaian kinerja 5 berkas.
8. Nilai kinerja anggaran BNN Kota Banjarmasin adalah 98,50 yang diukur dari sesuai dengan PMK Nomor : 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017.
9. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Banjarmasin dengan target 95 dan capaian kinerja 98,50

Dari beberapa indikator diatas, kinerja outcome BNN Kota Banjarmasin Tahun 2022 sebesar **137,51%**.

Realisasi anggaran belanja BNN Kota Banjarmasin Tahun 2022 adalah sebesar **Rp.1,742,812,418** atau **98,45%** dari total anggaran yang disediakan yaitu sebesar **Rp.1.770,147,000**

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Sumber Hukum	2
c. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
d. Sistematika Penyajian	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
a. Capaian Kinerja Organisasi	18
b. Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	38
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran yang disusun dengan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/388/XII/2015/BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), selain sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengonsumsikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip – prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ini ditegaskan lagi dalam misi, visi dan program terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong serta nawa-cita presiden yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui upaya pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Selain itu laporan kinerja yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

B. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleggaran Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
7. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/388/XII/2015/BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi danBadan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana strategi Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Kepala BNN Nomor 8 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BNN;
11. Keputusan Kepala BNN Nomor 388 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP danBNNK/Kota

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala.

2. Tugas

Adapun tugas dari BNN Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;

- g. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

3. Fungsi :

Selain mempunyai tugas, BNN Kota Banjarmasin juga mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
- c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.

- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- l. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
- m. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan

adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.

- o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- p. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
- q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
- r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- s. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
- t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- u. Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- v. Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada BNN Kota

Banjarmasin adalah sebagai berikut ;

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

 a. Capaian Kinerja Organisasi

 b. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran

 a. Perjanjian Kinerja

 b. Lain – lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Target penanganan permasalahan narkoba seperti yang tercantum dalam RPJMN 2020 - 2024 adalah menahan laju prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 0,05% per tahun.

Dari 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan pada RPJMN 2020-2024 yang menjadi agenda visi dan misi, terkait dengan BNN memiliki sasaran antara lain: "(6) Penegakan Sistem Hukum yang bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya"

Keberhasilan BNN Kota Banjarmasin menjalankan program pencegahan dan rehabilitasi secara masif membuktikan bahwa BNN berhasil meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa dengan tidak terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama di wilayah Kota Banjarmasin.

Penjabaran keberhasilan tersebut di atas merupakan implementasi dari RKP 2022, Renstra 2020-2024, Renja 2022, dan Perjanjian Kinerja BNN Tahun Anggaran 2022.

Adapun Perjanjian Kinerja BNN Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel di bawah ini.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANJARMASIN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,68
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,30
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Banjarmasin	3,2
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Banjarmasin	87
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Banjarmasin	95

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	73.200.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp	101.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp	155.150,000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	10.155.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	130.551.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu narkoba	Rp	9.383.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Rp	50.000.000
8. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	75.000.000
9. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	19.680.000
10. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	13.840.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	1,090,288,000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	12.000.000

Rencana Program Kerja (RENPROJA)

Tahun 2020 - 2024

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN Kota Banjarmasin	88	99	99	99	99
2	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kota Banjarmasin	94	94	95	96	97

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap penyalahgunaan narkoba	50	51	52	53	53,51
4	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap penyalahgunaan narkoba	78,67	78,67	78,70	78,75	78,8
5	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipatif	3, 21	3, 21	3, 22	3, 23	3, 24
6	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	nilai keterpulihan kawasan rawan	-	2,52 (Siaga)	3,00 (Siaga)	3,25 (Siaga)	3,26 (Aman)

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional (Lembaga)	1	2	2	3	3
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	-	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Banjarmasin	3,20	3,20	3,21	3,22	3,23

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 (Berkas)	1	1	1	1	1

No	Sasaaran Kegiatan	Indikator Kinerja	RO	Target	Pendanaan
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika Yang Terbentuk (PN)	10 Orang	75.000.000
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5 Keluarga	40.000.000
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa (PN)	3 Desa	61.875.000
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba (PN)	2 Lembaga (3,2)	196.025.000
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana	4 Orang	15.700.000

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	RO	Target	Pendanaan
1	2	3		4	5
		Nilai Tingkat Keamanan barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika Ketertibab dan Kesehatan Tahanan			
5	Meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkotika melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan	Persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup	Data dan Pelaporan Klien Rehabilitasi	1 Laporan	9.383.000
6	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara IBM Yang Terlatih	Petugas Rehabilitasi Berbasis masyarakat Yang Diberikan Pelatihan	5 Orang	10.155.000
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional 2. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	Layanan Rehabilitasi di BNNP/BNNK	40 Orang	53.895.000
			Layanan IBM	15 Orang	7.056.000
			Layanan SKHPN	300 Orang	69.600.000
			Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional	3 Lembaga	5.440.000
			Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Yang Terbentuk	1 Lembaga	9.885.000

8	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba	1 Perkara	50.000.000
---	---	---	--------------------------------------	-----------	------------

9	Meningkatnya Tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja	Layanan Perkantoran	12 Bulan	71.400.000
			Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	3.600.000
10	Meningkatnya pengelolaan SDM, organisasi dan tata laksana yang efektif	Indeks Kepuasan Penyelenggara n layanan kepegawaian (skala 4)	Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	10 Orang	19.680.000
		Persentase penilaian atas efektivitas penataan tatalaksana			
11	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Banjarmasin	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	3.840.000
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	10.000.000
12	Meningkatnya pelayanan umum secara maksimal	1. Indeks kualitas penyelenggara n ketatausahaan	Layanan BMN	1 Layanan	300.000
			Layanan Umum	1 Layanan	66.057.000
		2. Indeks kualitas			

		pengadaan			
		dan pengelolaan barang dan jasa	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1.023.931.000
13	Meningkatnya fungsi layanan publikasi kelembagaan dan keprotokolan yang optimal	1. Indeks layanan kehumasan 2. Persentase tingkat kepuasan layanan ke protokol	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 layanan	12.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja BNN merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah disepakati oleh seluruh pejabat pemangku program dengan dengan kepala BNN untuk mencapai sasaran strategis. Secara *cascading* turun hingga ke level bawah.

Sasaran strategis yang dicapai merupakan hal yang harus dipertanggung jawabkan kepada publik, apakah program dan kegiatan yang dilakukan memiliki *benefit* (manfaat) kepada masyarakat.

Perjanjian Kinerja BNN Kota Banjarmasin Tahun 2022 menetapkan 8 (delapan) sasaran yang akan dicapai, dengan indikator kinerja sebanyak 9 (sembilan) indikator. Dari 9 (sembilan) indikator tersebut dapat disimpulkan memenuhi target.

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian 8 (delapan) sasaran strategis Tahun 2022 dan penjelasan hasil capaian 9 (sembilan) Indikator Kinerja sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Real	%
1	2	3	4		
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00	52,13	102,2
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,68	99,86	126,9
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,30	3,55	110,9

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Real	%
1	2	3	4		
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lemb	3 Lemb	100
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit	1 Unit	100
5	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Banjarmasin	3,3	3,3	100
6	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas	5 Berkas	400
7	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Banjarmasin	87	88,10	101,2
8	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Banjarmasin	95	91,67	96,4

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Kota Banjarmasin selama kurun waktu Tahun 2022, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

1	SASARAN : "Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika"
----------	--

Upaya menanggulangi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, BNN sebagai *focal point* penanggulangan narkoba telah melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba secara massive. Adapun

LAPORAN KINERJA BNN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

target yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah terkendalinya laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 0,05% setiap tahun.

Strategi yang akan dilaksanakan dengan mengekstensifikasi dan intensifikasi informasi P4GN kepada seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai sasaran diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00	52,13	102,2

Definisi operasional adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba.

Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan cara pengisian kuesioner DEKTARI oleh Remaja Teman Sebaya yang telah mengikuti kegiatan Dialog Interaktif Remaja. Adapun dimensi yang diukur meliputi :

- *Self Regulation* yaitu kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri.
- *Assertiveness* yaitu kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas.
- *Reaching Out* yaitu kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

Capaian tersebut didapat dari hasil pembentukan 10 remaja teman sebaya melalui kegiatan dialog interaktif sebanyak 5 kali pertemuan. Mereka

merupakan perwakilan dari 2(dua) Desa/kelurahan Kelayan Barat dan Alalak Utara, Kemudian mereka dibentuk sebagai kader anti narkoba yang bertugas menyebarkan informasi P4GN kepada teman sebayanya dilingkungan masing-masing. Setiap kegiatan penyebaran informasi P4GN tersebut didapatkan peserta secara keseluruhan dengan total 350 orang yang kemudian dilakukan pengukuran pemahaman melalui pengisian kuesioner DEKTARI dengan capaian 52,13 kategori "Tinggi".

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 sebesar 54,09 maka terjadi penurunan sebesar 4,00 atau 8,00%.

Adapun faktor penurunan ini karena tahun 2022 melakukan kuisisioner online lewat aplikasi, keberhasilan karena adanya peran serta media dalam menggelorakan P4GN kepada seluruh elemen masyarakat. Walaupun demikian, dalam pelaksanaan kami mengalami kendala yaitu kesulitan dalam pengumpulan data lapangan dan kendala Pandemi COVID-19. Sebagai rekomendasi kedepan agar setiap kegiatan desiminasi informasi lebih difokuskan pada tingkat efektivitas informasi sehingga apa yang diharapkan tepat sasaran.

2	SASARAN : "Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba"
----------	---

Selain meningkatkan daya tangkal ketahanan diri remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, perlu juga menasar pada daya tangkal ketahanan keluarga. Hal tersebut dilakukan melalui indikator :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,68	99,86	126,9

Definisi Operasional Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal.

Adapun metode pengukuran dilakukan dengan :

- Metode pengukuran Keluarga Penerima Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dihitung dari jumlah keluarga yang telah mengikuti kegiatan program fasilitasi ketahanan keluarga Anti Narkoba dan berkomitmen sebagai responden dalam pengukuran indeks ketahanan keluarga.
- Metode pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dihitung dari hasil pengisian instrument ketahanan keluarga (PAFAS, SDQ, CYRM) oleh keluarga penerima program ketahanan keluarga yang terpilih.

Capaian kegiatan tersebut didapat dari hasil kegiatan asistensi pelaksanaan ketahanan keluarga anti narkoba sebanyak 10 keluarga (Orang Tua dan anak) yang berasal dari Kelurahan Kelayan Barat dan Alalak Utara. Dari hasil pengukuran didapat hasil capaian yaitu 99,86 dengan kategori "Sangat Tinggi".

Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yaitu sebesar 84,82 maka Tahun 2022 ini mengalami peningkatan sebesar 15,04 atau 19,4%

Adapun faktor pendukung keberhasilan karena adanya peran serta media aparat desa dan SKPD dalam menggelorakan P4GN kepada seluruh elemen masyarakat. Walaupun demikian, dalam pelaksanaan kami

mengalami kendala yaitu kesulitan dalam pengumpulan data lapangan dan kendala Pandemi COVID-19. Sebagai rekomendasi kedepan agar setiap kegiatan penyelenggaraan advokasi lebih difokuskan pada tingkat efektivitas informasi sehingga apa yang diharapkan tepat sasaran.

3	SASARAN : "Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN"
----------	--

Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN perlu dilaksanakan dalam rangka kebijakan tanggap ancaman narkoba. Kebijakan ini di sasarkan pada 4 lingkungan dasar yaitu : Instansi Pemerintah, Swasta, Lingkungan Pendidikan dan Kelompok Masyarakat yang akan di ukur dengan indicator kinerja berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20	3,55	110,9

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masingmasing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba.

Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :

- a. SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.

- b. Metode; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
- c. Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.
- d. Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- e. Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- f. Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

Untuk mengukur capaian kinerja tersebut, BNN Kota Banjarmasin melakukan monitoring dan evaluasi kepada lembaga pemerintah, swasta, kelompok masyarakat dan lembaga pendidikan ditingkat daerah. Dimana secara keseluruhan rata- rata indeks kemandirian partisipasi sebesar 3,55 dengan kategori ***“Sangat mandiri”***

Tabel 2. Institusi/Lembaga yang Responsif Terhadap Kebijakan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba

No	Lingkungan	Jumlah Lembaga	IKP	Kategori
1	Instansi Pemerintah	1	3,60	Sangat Mandiri
2	Kelompok Masyarakat	1	3,50	Sangat Mandiri
Total		2	3,55	Sangat Mandiri

Permasalahan dalam kegiatan karena kurangnya pemahaman Institusi terhadap kegiatan P4GN dilingkungan masing-masing serta dukungan anggaran dan sarana prasarana dalam mengimplementasikan program P4GN. Rekomendasi ke depan perlu peningkatan dukungan pemerintah Daerah dalam pelaksanaan P4GN dan kegiatan dilaksanakan sesuai Time Line.

Rencana aksi kedepan pelaksanaan P4GN baik desiminasi maupun advokasi lebih menitik beratkan pada outcome agar masyarakat memiliki ketahanan diri . Selain itu juga target wilayah yang akan menjadi sasaran kinerja sesuai dengan prioritas kerawanan daerah, program/kegiatan, hasil dan keluaran serta anggaran yang tersedia.

4	SASARAN : "Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba"
----------	---

Sasaran keempat diatas dapat di implementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga	3 Lembaga	100

Definisi Lembaga Rehabilitasi yang Operasional adalah Lembaga rehabilitasi narkoba yang memenuhi standar adalah Lembaga rehabilitasi narkoba yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar pelayanan.

Pengukuran dilakukan dengan cara mendata jumlah Lembaga rehabilitasi narkoba yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran.

Adapun kegiatan ini ditujukan agar layanan rehabilitasi narkoba dapat mencapai dan dirasakan oleh masyarakat dan mengarah pada peningkatan mutu dan kualitas layanan rehabilitasi narkoba yang berkelanjutan.

BNN Kota Banjarmasin dalam hal ini menunjuk 2 (Dua) Lembaga sebagai perpanjangan tangan BNN dalam memberikan layanan rehabilitasi narkoba yaitu Puskesmas sungai jingah dan Puskesmas S.PARMAN Adapun rincian data dari puskesmas Sungai Jingah adalah sebagai berikut yaitu merupakan rehabilitasi narkoba rawat jalan yang juga mengarah ke masalah medis yang dialami klien dengan periode rawatan 4 sampai 6 bulan, selain itu ada layanan tambahan seperti konseling langsung dengan dokter spesialis jiwa setiap 1 (Satu) bulan sekali, jumlah tenaga yang memberikan layanan berjumlah 17 Orang, terdiri dari 2 Dokter, 7 Perawat, 4 Staff Administrasi dan 4 Tenaga Lainnya, sarana prasarana untuk layanan rehabilitasi rawat jalan sementara ini digabung atau bergantian dengan layanan lain dikarenakan keterbatasan tempat.

Berikut juga rincian data dari Puskesmas S.Parman merupakan rehabilitasi narkoba rawat jalan yang juga mengarah ke masalah medis yang dialami klien dengan periode rawatan 4 sampai 6 bulan, selain itu ada layanan tambahan seperti konseling langsung dengan dokter spesialis jiwa setiap 1 (Satu) bulan sekali, jumlah tenaga yang memberikan layanan berjumlah 24 Orang, terdiri dari 5 Dokter, 12 Perawat, 5 Staff Administrasi dan 2 Tenaga Lainnya, sarana prasarana untuk layanan rehabilitasi rawat jalan sementara ini digabung atau bergantian dengan layanan lain dikarenakan keterbatasan tempat. Selama 1 Tahun Sudah dilaksanakan bimbingan teknis serta

peningkatan mutu namun belum ada petugas dari Puskesmas S.Parman yang diberikan pelatihan asesor narkotika ataupun yang sejenisnya.

Adapun faktor yang menghambat/ memperlambat pelaksanaan kegiatan tersebut:

1. Fasilitas dari tiap Lembaga yang kurang maksimal sehingga mempengaruhi hasil dari pelayanan rehabilitasi narkotika.
2. Kurang adanya kesadaran penyalahguna terhadap rehabilitasi rawat jalan sehingga tidak berminat untuk dilakukan rehabilitasi rawat jalan meskipun sudah di sediakan Lembaga rehabilitasi narkotika selain dari BNN.
3. Kurangnya promosi/sosialisasi rehabilitasi penyalahguna narkotika pada masyarakat.

Untuk rekomendasi ke depan sebagai berikut :

1. Memaksimalkan fasilitas yang ada untuk pelayanan Rehabilitasi
2. Perlunya penambahan fasilitas untuk mendukung dan memaksimalkan layanan.
3. Perlunya ditingkatkan sosialisasi ataupun promosi kegiatan rehabilitasi pada masyarakat.
4. Evaluasi perkembangan atau peningkatan mutu Lembaga rehabilitasi
5. Mengadakan pelatihan berbasis asesor atau sejenisnya bila ada guna meningkatkan mutu layanan rehabilitasi narkotika.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
2.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit	1 Unit	100

Definisi Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi

penyalahguna, korban penyalahguna dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya.

Pengukuran dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalahguna, korban penyalahguna dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam 1 (Satu) tahun anggaran.

Adapun kegiatan ini ditujukan agar layanan rehabilitasi narkoba dapat mencapai dan dirasakan oleh masyarakat dan mengarah pada peningkatan mutu dan kualitas layanan rehabilitasi narkoba yang berkelanjutan.

BNN Kota Banjarmasin dalam hal ini menetapkan 1 (Satu) unit IBM yang terletak di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjar Utara Adapun Kelurahan tersebut juga terpilih sebagai Kelurahan Bersinar, pemilihan Kelurahan tersebut selain terintegrasi dengan Kelurahan Bersinar juga merupakan kelurahan yang rawan penyalahgunaan narkoba. Dengan dukungan dari Aparat dan elemen Kelurahan setempat maka ditunjuklah Kelurahan Alalak Utara sebagai Unit IBM dari BNN Kota Banjarmasin. Selama kegiatan pelaksanaan IBM itu sendiri, sudah membuat Surat Keputusan untuk petugas IBM itu sendiri berjumlah 5 orang yang ditetapkan langsung oleh lurah alalak utara yang beranggotakan elemen masyarakat dan pembentukan Tim IBM itu sendiri langsung dibentuk oleh BNN Kota Banjarmasin, Adapun Tim IBM sudah dibekali dengan banyak ilmu tentang layanan rehabilitasi melalui Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh BNN Kota Banjarmasin, dilanjutkan dengan cara mengisi formulir serta dokumen kelengkapan untuk klien rehabilitasi di Kelurahan tersebut. Rapat antar Tim IBM sendiri pun sudah dilaksanakan guna bertujuan untuk mengenalkan IBM di kalangan masyarakat kelurahan tersebut.

Sejauh ini Tim IBM Kelurahan Alalak Utara sudah melaksanakan pendampingan Klien dengan masalah narkoba dari rentang anak sampai dewasa sebanyak 8 Orang, kemudian Agen Pemulihan sudah melaksanakan Sosialisasi langsung pada masyarakat terkait program IBM, Rehabilitasi dan Narkoba, pelaksanaan tes urin serta bina lanjut, kegiatan asistensi pun tidak lupa dilaksanakan oleh petugas BNN guna meninjau dan mengevaluasi hal-hal yang mungkin menghambat atau mencari solusi pada unit tersebut.

Adapun faktor yang menghambat/ memperlambat pelaksanaan kegiatan tersebut:

1. Keterbatasan kemampuan tiap anggota IBM dalam memberikan layanan Rehabilitasi khususnya keterbatasan dalam kemampuan komunikasi.
2. Kurang terjangkaunya informasi tentang narkoba dan rehabilitasi di masyarakat sehingga beberapa masyarakat kurang peduli bahkan menolak/malu saat Tim IBM Melaksanakan layanan ataupun sosialisasi masalah narkoba dan rehabilitasi.
3. Jam kerja Tim IBM yang berbeda-beda menyebabkan koordinasi antar tim sedikit terganggu ataupun saat melaksanakan rapat antar tim, beberapa anggota tidak bisa berhadir.

Untuk rekomendasi ke depan agar peningkatan kemampuan petugas IBM melalui bimbingan teknis lebih dimaksimalkan terumata dari segi materi dan waktu untuk mengurangi permasalahan/kendala di lapangan, hal ini dikarenakan latar belakang petugas IBM yang bermacam-macam.

5	SASARAN : "Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi"
---	---

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Banjarmasin	3,2	3,2	100

Definisi indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan penerima layanan yang diberikan di Klinik Pratama BNN Kota Banjarmasin

Metode pengukuran yang digunakan adalah melalui mengisi survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan rehabilitasi yang diberikan di Klinik Pratama BNN Kota Banjarmasin. Survei dilakukan secara berkala dengan pendekatan metode kuantitatif melalui pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum membagikan kuesioner kepada masyarakat yang telah mengakses layanan rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kota Banjarmasin. Indikator keberhasilan adalah adanya hasil survei yang terukur melalui kuesioner kepuasan yang telah dibagikan dan diisi oleh pelanggan layanan rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kota Banjarmasin. Indikator yang diukur adalah persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya atau tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan dan pelayanan pengaduan saran dan masukan.

Adapun IKM yang dihitung adalah nilai rujukan IKM dari BNN Provinsi Kalimantan Selatan, indeks kepuasan Layanan rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya dikategorikan "BAIK" oleh partisipan klien rehabilitasi rawat jalan. Adapun nilai IKM yang diperoleh adalah sebesar 3,257 (81,434).

Untuk rekomendasi kedepan agar pelayanan tetap konsisten dan perlu ditingkatkan lagi untuk memenuhi nilai kepuasan pelayanan terhadap masyarakat sangat baik.

6	SASARAN : "Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya"
---	---

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1 Berkas	5 Berkas	400

Berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkoba yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.

Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkoba yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan dari unit Pusat dan Vertikal.

Untuk pengungkapan kasus tindak pidana narkoba yang sudah dinyatakan P-21 oleh Jaksa peneliti dari BNN Kota Banjarmasin Selama Tahun 2022 adalah sebanyak 5 berkas dari yang ditargetkan 1 berkas. Hal ini merupakan suatu prestasi karena ada koordinasi antar lintas sektor. Untuk kedepan perlu ditingkatkan lagi pengungkapan kasus untuk memutus rantai jaringan peredaran gelap narkoba di wilayah Kota Banjarmasin.

7	SASARAN : "Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien"
----------	--

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Nilai Kinerja Anggaran BNN	87	88,10	101,2

Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan. Nilai kinerja Anggaran Sebagaimana Dimaksud meliputi :

- a. Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kemeterian / lembaga;
- b. Nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon I / program; dan
- c. Nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja / kegiatan.

Nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja/kegiatan sebagaimana dihitung berdasarkan nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja/ kegiatan terkait.

Penyerapan	98,23
Konsistensi	96,75
Capaian Rincian Output	100

Nilai Efisiensi	61,05
Efisiensi	4,42
Capaian Kinerja Anggaran	95,00

Rekomendasi kedepan agar pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran secara berimbang dengan memperhatikan timeline yang sudah di rencanakan, sehingga capaian kinerja anggaran minimal kategori sangat baik. Dengan demikian peningkatan proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien dapat terpenuhi.

8	SASARAN : "Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur"
----------	---

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Banjarmasin	95	91,67	96,4

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efesiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pengukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran, maka di dapatkan capaian dengan rincian sebagai berikut :

Aspek	Capaian
Kualitas Perencanaan Anggaran	96,75
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	98,23
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	100
Nilai IKPA	95

Rekomendasi kedepan agar lebih ditingkatkan lagi capaian dari semua aspek terutama kualitas perencanaan anggaran dengan meminimalisir Deviasi halaman III DIPA.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran belanja BNN Kota Banjarmasin Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 1.770,147,000** atau **98,45%** dari total anggaran yang disediakan yaitu sebesar **Rp. 1.741,812,418** dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Anggaran RP	Realisasi RP	Sisa	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-	-
2	Belanja Barang	1.770,147,000	1,741,812,418	28.334,582	98,45
Jumlah		1.770,147,000	1.741.812.418	28,334,582	98,45

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BNN

Dari PAGU Alokasi Anggaran sebesar **Rp.1.210.808.000** telah terealisasi sebesar **Rp.1.191.066.638** atau **98,37%** dengan sisa anggaran sebesar **Rp.19.741.362** atau **1,63 %**.

Sisa anggaran tersebut diatas sebagian besar di akibatkan adanya perbedaan harga satuan perencanaan dengan realisasi belanja yang

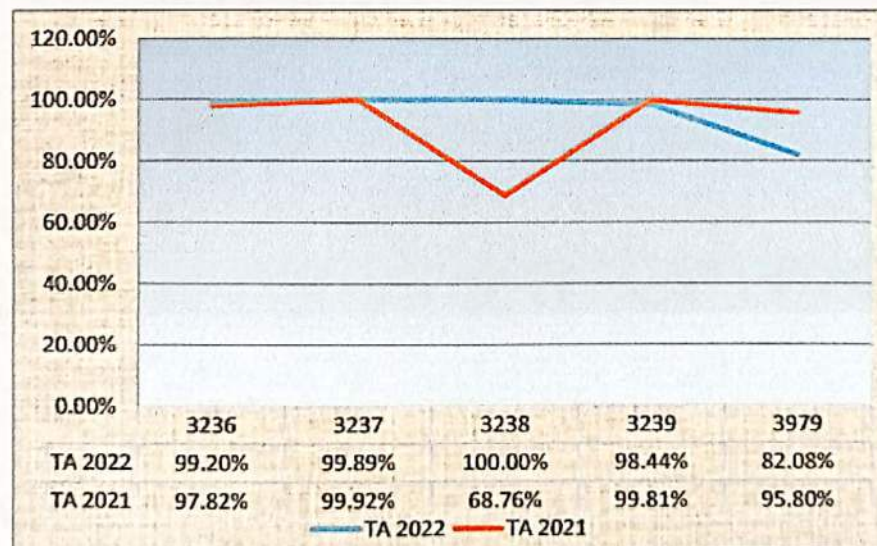
terjadi disamping adanya efisiensi penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa.

**Grafik 2. Realisasi Anggaran Per Kegiatan
BNN Kota Banjarmasin 2022**



Jika dibandingkan dengan tahun yang lalu maka ada penurunan sebesar 0.91 %. Namun penurunan tersebut kurang begitu signifikan. Hal tersebut dapat kita lihat pada grafik berikut ini :

**Grafik 3. Perbandingan Realisasi Per Kegiatan Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
BNN Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan 2021**



2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Realisasi anggaran untuk Program P4GN adalah sebesar **Rp.550.745.780** atau **98,46 %** dari alokasi PAGU anggaran yaitu sebesar **Rp.559.339.000** dengan sisa anggaran **Rp.8.593.220** atau **1,54 %**.

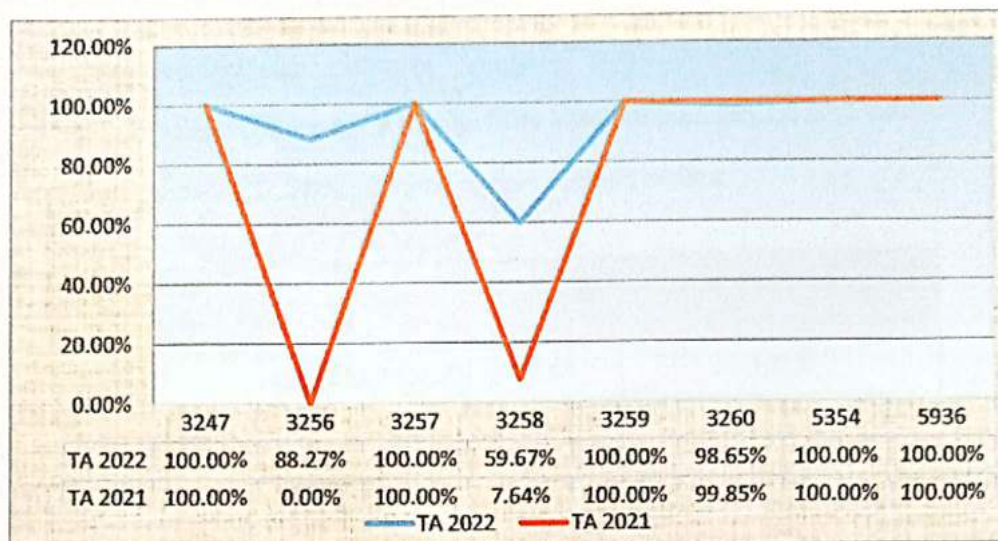
Sisa anggaran tersebut diatas di sebabkan belum optimalnya pelaksanaan Program Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Jika dibandingkan antara *input*, *output* dan *outcome* terkait dengan anggaran program P4GN dari 8 kegiatan, ada 1 kegiatan yang belum optimal dalam proses *input*, *output* dan *outcome* yang disebabkan kegiatan TAT karena di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin belum ada tempat rehabilitasi rawat inap gratis sehingga menyebabkan tersangka terbebani untuk rehabilitasi rawat inap yang masih dipungut biaya, sehingga program layanan ini belum tercapai.

**Grafik 4. Realisasi Anggaran Per Kegiatan
BNN Kota Banjarmasin 2022**



**Grafik 4. Perbandingan Realisasi Per Kegiatan Program P4GN
BNN Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan 2021**



Namun, secara keseluruhan terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar 0,09% dibandingkan penyerapan anggaran Tahun 2021 sebesar 98.37%.

BAB IV PENUTUP

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja BNN Kota Banjarmasin TA 2022 rata – rata sebesar 137,51 % , dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	51,00	52,13	102,2
2	78,68	99,86	126,9
3	3,20	3,55	110,9
4	3 Lembaga	3 Lembaga	100
5	1 Unit	1 Unit	100
6	3,2	3,2	100
7	1 Berkas	5 Berkas	400
8	87	88,10	101,2
9	95	91,67	96,4

Rentang Capaian	Kategori
Capaian $\geq$ 100%	Memuaskan
$85\% \leq$ Capaian $<$ 100%	Sangat Baik
$70\% \leq$ Capaian $<$ 85%	Baik
$55\% \leq$ Capaian $<$ 70%	Cukup
$55\% \leq$ Capaian	Kurang

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran belanja BNN Kota Banjarmasin Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 1.770,174,000** atau **98,45%** % dari total anggaran yang

disediakan yaitu sebesar Rp. 1.741,812,418 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran RP	Realisasi RP	Sisa	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-	-
2	Belanja Barang	1.770,147,000	1,741,812,418	28.334,582	98,45
Jumlah		1.770,147,000	1.741.812.418	28,334,582	98,45

C. Rekomendasi/Rencana Aksi Kedepan

1. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/sosial, media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN
2. Perlu meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta untuk mendukung program P4GN
3. Perlu ditingkatkan peran serta masyarakat melalui penggiat anti narkoba dari berbagai kalangan. Sehingga program prioritas nasional dapat tercapai secara maksimal.
4. Untuk layanan rehabilitasi baik melalui klinik BNN maupun lembaga rehab lainnya, agar memaksimalkan pendekatan kepada masyarakat.
5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dari tingkat perencanaan hingga pelaporan dan melakukan perbaikan sesegera mungkin.

LAMPIRAN

Definisi dan Pengukuran Indikator Kinerja BNNK Banjarmasin Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis/Program & Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi dan Pengukuran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba. Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan diri kepada kalangan remaja secara sampling pada 173 Kabupaten/Kota wilayah kerja BNNK dengan menggunakan instrumen ukur ketahanan diri (Anti Drug Scale) yang mencakup 3 dimensi, yaitu Self Regulation yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri. Dimensi Assertiveness yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas. Dimensi Reaching Out yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.	Kepala BNNK
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal. Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan keluarga secara sampling pada 173 Kabupaten/Kota wilayah kerja BNNK dengan menggunakan instrumen SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaires), PAFAS (Parent And Family Adjustment Scales), dan CYRM (Child and Youth Resilience Measure).	Kepala BNNK
3	Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba;	Kepala BNNK

			Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut : a) SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya. b) Metode; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN. c) Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing. d) Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya. e) Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya. f) Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.	
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi narkoba yang memenuhi standar	Lembaga rehabilitasi narkoba yang memenuhi standar adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkoba yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran.	Kepala BNNK
		Jumlah unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat	Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.	Kepala BNNK
5	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di Klinik Pratama	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.	Kepala BNNK

			Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada PERMENPAN NO.14 TAHUN 2017 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	
6	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	Berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkoba yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan. Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkoba yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan dari unit Pusat dan Vertikal.	Kepala BNNK
7	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks. Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem Informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.	Kepala BNNK
8	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	IKPA adalah Indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Pengukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.	Kepala BNNK